

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembahasan mengenai kesejahteraan merupakan suatu pembahasan yang mempunyai cakupan atau ruang lingkup yang luas. Pembahasan mengenai kesejahteraan berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi, dimana usaha dalam pembangunan ekonomi merupakan usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan sebuah negara. Pembangunan ekonomi dalam suatu negara biasanya ditandai dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang pada negara tersebut.

Ada 2 (dua) jenis indikator pembangunan yakni indikator moneter dan indikator non moneter (Arsyad, 2004). Yang termasuk ke dalam indikator moneter antara lain pendapatan per kapita dan indikator kesejahteraan ekonomi bersih. Dalam indikator non moneter ada 3 (tiga), yaitu, *pertama* indikator sosial, *kedua* indikator kualitas hidup dan pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, dan tingkat pendapatan riil per kapita masyarakat, dan yang *ketiga* adalah indikator campuran, yang meliputi, pendidikan, kesehatan, perumahan, angkatan kerja, KB dan fertilitas, ekonomi, kriminalitas, perjalanan wisata, dan akses media massa.

Salah satu pembahasan yang cukup menarik tentang kesejahteraan adalah persoalan kemiskinan. Melihat pada studi pembangunan ekonomi, kemiskinan merupakan suatu fenomena yang ditemukan di dalam sebuah negara berkembang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, fenomena ini merupakan persoalan dan tantangan yang harus segera diselesaikan agar negara-negara berkembang dapat bergerak ke tingkatan di atasnya atau kelompok negara maju. Oleh karenanya penelitian mengenai kemiskinan merupakan penelitian yang terus ada dan dikembangkan oleh para pakar dalam bidang ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya.

Teori-teori ekonomi pembangunan yang berkembang tidak menyinggung masalah kemiskinan secara eksplisit sebagai suatu permasalahan yang memerlukan pendekatan khusus dalam penyelesaiannya. Sementara itu, teori pembangunan mengasumsikan bahwa masalah kemiskinan akan teratasi dengan

sendirinya melalui mekanisme pertumbuhan ekonomi. Seperti pendapat Kuznets, bahwa ketimpangan distribusi pendapatan merupakan syarat keharusan bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi pada awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, kemudian sampai pada tahap berikutnya distribusi pendapatan akan membaik (Todaro, 2000:174)

Kemiskinan sering dianggap sebagai suatu keadaan yang biasanya dihubungkan dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan, kekurangan, kelaparan atau kesulitan dalam keadaan hidup. Kemiskinan menurut Bappenas adalah situasi atau kondisi yang dialami oleh seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai pada taraf yang dianggap manusiawi (Barika, 2013). Kemiskinan meliputi dimensi politik, sosial budaya dan psikologi, ekonomi dan akses terhadap asset. Menurut Bank Dunia, kemiskinan adalah kurangnya kesejahteraan. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah menganggap kesejahteraan sebagai penguasaan atas barang secara umum. Secara khusus, kemiskinan kemudian diukur dengan membandingkan pendapatan atau konsumsi setiap individu dengan beberapa standar yang telah ditetapkan. Dengan kata lain bahwa individu atau kelompok yang berada di bawah standar yang telah ditetapkan, maka ia dianggap miskin.

Penetapan standar kemiskinan dilakukan berdasarkan parameter dan indikator yang diciptakan untuk mengukur tingkat kemiskinan dan menghitung jumlah penduduk miskin. Parameter dan indikator yang diciptakan ini biasanya secara khusus berbeda-beda pada masing-masing negara dan secara umum dihitung berdasarkan standar Internasional. Bank Dunia, misalnya, mengukur kemiskinan dengan patokan tingkat pengeluaran per hari di bawah \$2, Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional menggunakan acuan pemenuhan 2.100 kalori per kapita, sedangkan BKKBN mengacu pada indikator karakteristik rumah tangga (Bappenas, 2012).

Pada laporan Bappenas tentang evaluasi pelayanan keluarga berencana bagi masyarakat miskin, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 ditunjukkan bahwa mereka yang memiliki latar belakang pendidikan rendah dan kurang sejahtera memiliki tingkat kelahiran yang lebih

besar. Jika tidak diupayakan pengendalian penduduk secara serius, hal ini berimplikasi kepada beratnya beban pemerintah dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar berupa pendidikan dan kesehatan (Bappenas, 2010).

Di Indonesia, sejarah kemiskinan setidaknya dapat kita lihat kembali pada laporan-laporan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Krisis moneter yang terjadi tahun 1998 merupakan angka kemiskinan tertinggi yang pernah dirasakan oleh Indonesia dengan jumlah 49, 5 juta jiwa dengan persentase 24,2% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia. Dengan arti bahwa kurang lebih seperempat penduduk Indonesia pada tahun 1998 merupakan penduduk miskin.

Kondisi yang buruk ini memaksa pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk menciptakan upaya dalam rangka pengentasan kemiskinan yang dilakukan dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu yang menjadi prioritas dalam program pemerintah. Program pengentasan kemiskinan setidaknya dibagi ke dalam 3 kelompok, antara lain; program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Untuk meningkatkan efektifitas upaya pengentasan kemiskinan ini, pemerintah juga menuangkannya ke dalam Perpres No. 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Melihat perkembangan kemiskinan di Indonesia pasca krisis moneter 1998, tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung menurun. Menurut publikasi data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 1998 mencapai 49, 5 juta jiwa dan pada tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia menjadi 28,51 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin ini fluktuatif dan mengalami kecenderungan yang menurun. Penurunan sebesar kurang lebih 21 juta jiwa ini memberikan bukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pengentasan kemiskinan memberikan dampak yang baik. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan tentu dilakukan dalam ruang lingkup yang menyasar kepada faktor-

faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu sendiri, yang dimana juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam peningkatan kesejahteraan.

Dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010-2014, persentase kemiskinan di Indonesia menurun 2,37%, dimana secara berturut-turut 2010 (13,33%), 2011 (12,36%), 2012 (11,66%), 2013 (11,47), dan 2014 (10,96%). Disisi lain, tingkat pendidikan di Indonesia dilihat dari angka melek huruf dari tahun 2010-2014 mengalami kecenderungan peningkatan sebesar 2,21%, dimana tahun 2010 sebesar 92,91% meningkat pada tahun 2014 menjadi 95,12%. Tingkat pendapatan dilihat dari angka PDRB per kapita juga meningkat sebesar 5,348.950, dimana pada tahun 2010 sebesar 28.778.170 meningkat pada tahun 2014 menjadi 34.127.720. Tingkat pengangguran juga dilihat dari angka tingkat pengangguran terbuka mengalami kecenderungan penurunan sebesar 1,2%, dimana tahun 2010 sebesar 7,14% menurun pada tahun 2014 menjadi 5,94%.

Wiguna (2013) dalam penelitiannya, melakukan analisis terhadap pengaruh PDRB, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dalam periode 2005-2010. Dalam analisisnya berkesimpulan bahwa pengaruh PDRB dan pendidikan yang dilihat dari angka melek huruf mempunyai pengaruh negatif dan signifikan. Kemudian pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Begitu juga dalam penelitian Rumahorbo (2014) mengungkapkan bahwa variabel pengangguran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Artinya ketika pengangguran meningkat maka jumlah penduduk miskin juga akan meningkat dan selanjutnya variabel pendapatan perkapita dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai kemiskinan di Indonesia melalui penelitian “Analisis Pengaruh Pendidikan, Pendapatan, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia”. Untuk meneliti mengenai kemiskinan di Indonesia, maka peneliti harus membuat rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh pendidikan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh pendapatan terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh tingkat pengangguran terhadap perubahan tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini:

1. Menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh atau penyelesaian kesarjanaan dalam bidang Ekonomi Pembangunan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai kemiskinan di Indonesia dan dapat menjadi sarana pembelajaran untuk menambah wawasan mengenai kemiskinan secara umumnya serta dapat

- digunakan sebagai salah satu sumber informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai kemiskinan, baik secara nasional maupun di daerah-daerah Indonesia.
3. Bagi pembuat kebijakan yang berfokus dalam pengentasan kemiskinan, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi dan menjadi bahan masukan untuk merumuskan berbagai kebijakan di masa yang akan datang.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari pendidikan, pendapatan, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Gambaran mengenai variabel pendidikan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka melek huruf menurut provinsi, variabel pendapatan digambarkan dengan menggunakan angka PDRB per kapita menurut provinsi, variabel pengangguran digambarkan dengan menggunakan angka persentase tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi, dan variabel kemiskinan digambarkan dengan menggunakan angka persentase penduduk miskin menurut provinsi. Adapun jumlah provinsi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 provinsi dengan periode tahun 2010-2014.

